

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap daerah karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang mendukung penyediaan sarana dan prasarana daerah sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang baik dan berperan penting dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007: 96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah”.

Menurut Erlina, dkk (2015: 136) “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan definisi Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (1) sumber pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.1.1.2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah Merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak (Halim dan Kusufi, 2014: 101). Menurut Undang-undang No.1 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2018: 14) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diperoleh dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak daerah tersebut yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.1.2.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Mahmudi (2009: 25) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

2.1.1.2.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang

mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (Halim dan Kusufi, 2014: 104).

2.1.1.2.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sejalan dengan definisi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Halim dan Kusufi (2014: 105) “Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas”.

Dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan disebutkan lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
3. Jasa giro.
4. Pendapatan bunga.
5. Tuntutan ganti rugi.
6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing.

7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

2.1.2 Belanja Modal

Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PSAP No. 2). Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akun belanja diukur dengan menggunakan basis kas.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Modal merupakan kelompok dari belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Erlina, dkk (2015:158) menyebutkan bahwa:

“Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap

lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.”

Dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Halim dan Kusufi (2014:107) menyebutkan yang termasuk belanja modal adalah: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; belanja aset lainnya.

Definisi lain dari Belanja Modal yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran disebutkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapasitas aset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dari definisi-definisi Belanja Modal di atas maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset yang memberikan nilai manfaat lebih dari dua belas bulan atau satu periode akuntansi untuk digunakan dalam pemerintahan.

2.1.2.2 Jenis Jenis Belanja Modal

Jenis-jenis belanja modal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran

1. Belanja Tanah

Yaitu seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Yaitu pengeluaran untuk pengadaan/penambahan/penggantian peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapotalisasi.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Yaitu pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual).

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Yaitu pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai/digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya

konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap dipakai termasuk pengeluaran setelah perolehan jalan, irigasi, dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisi.

5. Belanja Modal Lainnya

Yaitu pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja tersebut di atas. Termasuk dalam belanja modal ini adalah kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah, hewan ternak dan tanaman.

6. Belanja modal Balan Layanan Umum (BLU)

Yaitu pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.3 Belanja Pegawai

2.1.3.1 Pengertian Belanja Pegawai

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk):

“Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.”

Ratmono dan Sholihin (2015: 32) juga berpendapat:

“Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.”

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintahan.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja pegawai termasuk dalam belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pasal 146 ditentukan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Belanja Pegawai

Berdasarkan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pegawai termasuk dalam kelompok belanja langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai dalam kelompok belanja

tidak langsung terdiri dari gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai tidak langsung juga terdiri dari uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepada daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai yang termasuk dalam kelompok belanja pegawai langsung terdiri dari pengeluaran untuk honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Total belanja pegawai langsung dan tidak langsung ini kemudian menjadi belanja pegawai dalam APBD sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Erlina, dkk (2015: 155) juga menuliskan dalam bukunya “Belanja Pegawai Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Sedangkan untuk Belanja Pegawai Langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program pemerintahan (Erlina, dkk. 2015: 158).

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan daerah merupakan gambaran ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besar

kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan Pemerintah Pusat dan pinjaman.

Menurut Halim (2007: 232) Kemandirian Keuangan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Tangkilisan (2017: 89) mengemukakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.1.4.3 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014: 140) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah, semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

(Halim, 2014)

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

2.1.4.4 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 2. 1
Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim, 2014

Menurut Halim (2014: 168) hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling utama adalah hubungan pelaksanaan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

2. Pola Hubungan Konsultif

Pola hubungan konsultif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif berarti peran pemerintah pusat semakin berkurang dan tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi, peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipatif.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

2.1.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan, antara lain:

1. Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Siska Yulia Defitri (2020) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat. Faktor belanja modal dan belanja pegawai dalam menentukan pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat tahun 2016-2017 hanya sebesar 12,5%. Hasil ini menunjukkan rendahnya kontribusi belanja modal dan belanja pegawai dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat.

3. Riswanda Imawan dan Agus Wahyudin (2014) dengan judul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dengan arah negatif berpengaruh. Ukuran dan *Wealth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Inul Rofiq dan Fefri Indra Arza (2021) dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai, dan *Leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, dan *Leverage* berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD, dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan daerah.
5. Darwanis dan Ryanda Saputra (2014) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan arah positif. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah.

6. Ema Nur Indah Fitriyani dan Agus Endro Suwarni (2021) dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat Kemandirian keuangan daerah, karena jika PAD yang dihasilkan tinggi maka daerah tersebut dapat membiayai kebutuhannya sendiri sehingga akan mengurangi dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. DAU berhubungan signifikan negatif pada tingkat kemandirian keuangan daerah, yang berarti jika semakin besar dana alokasi umum yang dibagikan pemerintah kepada salah satu daerah maka semakin kecil tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Belanja modal berhubungan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, karena jika belanja modal digunakan untuk belanja fasilitas publik maka akan membuat kemandirian suatu daerah menurun karena menambah pengeluaran yang dikeluarkan oleh daerah. Belanja Pegawai tidak memiliki pengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga setiap peningkatan atau penurunan dari belanja pegawai tidak akan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.
7. Sulaiman, M. Toyib, dan Melani (2021) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah,

Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

8. Septa Efrieni Putri (2014) dengan judul “Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Jumlah Aset Tetap Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013”. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian atau kemampuan keuangan daerah diperoleh hasil rata-rata kurang dari 10% yang berarti berada pada tingkat rendah sekali. Variabel belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan jumlah aset tetap berpengaruh signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah sedangkan variabel belanja modal berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang dan jasa merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan rasio kemampuan keuangan daerah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, sementara jumlah aset tetap daerah memberikan pengaruh negatif terhadap kemampuan keuangan daerah, ini karena besarnya penambahan aset tetap akan mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah. Variabel belanja modal bukan faktor utama yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan

karena alokasi belanja modal belum diprioritaskan untuk sarana pembangunan yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD.

9. Eny Wahyuni dan Lilis Ardini (2018) dengan judul “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya pemerintah daerah telah melakukan upaya peningkatan pembangunan daerah sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, artinya terdapat alokasi belanja modal yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan daerah kurang produktif dalam penyaluran dana yang dikeluarkan yang tidak menambah kekayaan tetapi menjadikan beban DAU. Variabel belanja pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini terjadi karena jumlah belanja pegawai terjadi peningkatan dan menyebabkan penurunan terhadap kemandirian keuangan daerah serta akan membebani stabilitas keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.
10. Anita Lestari, Nasrullah Dali, dan Muntu Abdullah (2016) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. DAU memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, artinya semakin besar DAU maka akan semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Belanja modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya besar kecilnya perubahan yang terjadi pada belanja modal tidak memiliki peran dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

11. Diana Yusiawati dan A.A.I.N. Marhaeni (2020) dengan Judul “*Effect of Investment, GRDP Percapita, and Original Local Government Revenue on regional Financial Independence through Capital Expenditure as Intervening Variables*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Investment* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, *GRDP percapita* dan *Original Local Government Revenue* (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Investment* dan *Original Local Government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. *GRDP*

Percapita tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal dapat memediasi pengaruh *Investment* dan *Original Local Government* terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja Modal dapat memediasi pengaruh GRDP *Percapita* terhadap kemandirian keuangan daerah.

12. Doves Ardinugroho, Albertus Maqunus Soesilo, dan Mulyanto (2021) dengan judul “*The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Regional Expenditures on Regional Financial Independence (Case Study in Central Java Province 2014-2018)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah. Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mengelola daerahnya dengan baik dan cenderung kurang bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat jika pendapatan asli daerah lebih besar dari dana perimbangan, jika dana perimbangan semakin tinggi maka dampaknya terhadap belanja daerah yang juga akan meningkat. Adanya sistem penganggaran yang masih menitikberatkan pada prinsip anggaran yang harus dikeluarkan dapat menurunkan kualitas belanja daerah karena anggaran dapat dibelanjakan tidak sesuai dengan target daerah dan kebutuhannya sehingga belanja daerah menjadi tidak efektif.

13. Muhammad Yasin (2020) dengan judul “*Analysis of Regional Revenues and Routine Expenditures on Regional Financial Performance in East Java Regencies and Cities*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Timur. Belanja Rutin memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kinerja Keuangan daerah Jawa Timur.
14. I Gusti Putu Suambara dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2020) dengan judul “*The Influence of Regional Revenue, Balancing Funds, and Capital Expenditure on Regional Financial Performance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.
15. Jouzar Farouq Ishak (2021) dengan judul “*The Determinants Factors of Regional Financial Independence*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh faktor-faktor determinan terhadap kemandirian keuangan daerah adalah signifikan. Hanya variabel lain-lain PAD yang sah yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dua faktor lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Maluku dan Papua.

16. Ina Sarah Normalita dan Amir Mahmud (2017) dengan judul “*Analysis of Capital Expenditure and Its Implications on Local Financial Independence*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dan Aset Tahun Lalu berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap belanja modal. Dana Insentif Daerah (DID) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Ini berarti bahwa pemerintah daerah telah mengelola dan menggunakan dana anggaran dengan baik. Dana perimbangan mampu memberikan dorongan terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, berupa peningkatan pembangunan infrastruktur dan berimplikasi pada tingginya belanja modal.
17. Henda Hendawati, Dekrita Komarasakti, dan Surya Ansori (2018) dengan judul “*The Effect of capital Cost and General Allocation Fund to The Regional Financial Independence in Bandung City Government*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Bandung.
18. Baldric Siregar dan Nurna Pratiwi (2017) dengan judul “*The Effect of Local Government Characteristics and Financial Independence on Economic Growth and Human Development Index in Indonesia*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran, Usia, Status, Jumlah SKPD, dan

leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja Pegawai berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Index Pembangunan Manusia.

19. Harry Setiadi Utomo, Rusman Soleman, dan Hartaty Hadady (2021) dengan judul “*The Effect of Capital Expenditures and General Allocation Funds on Local financial Independence Through Local Revenue as an Intervening Variable in Districts and Cities in North Maluku Province*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *General Allocation* tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Umum secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.
20. Anggi Pratama Nasution, Bagus Handoko, dan Ilham Rizki Adi Pohan (2019) dengan judul “*Analysis of Influence of Regional Original Income, Central Government Transfers and Regional Shopping Efficiency on Regional Financial Independence*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dan transfer pemerintah pusat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun

efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan, variabel Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 2. 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun, dan Judul, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal Tempat penelitian: Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Alat Analisis Regresi Data Panel	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU)	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan	<i>Jurnal Accounting and Finance</i> Vol. 2 No. 1 Maret 2018 hal 12-19 Universitas Telkom E-ISSN 2581-1088

					daerah.
2	Siska Yulia Defitri (2020) Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)	Variabel Dependen kemandirian keuangan daerah Variabel Independen: Belanja Modal, Belanja Pegawai	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Alat Analisis Regresi Linear berganda Tempat Penelitian Kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat	Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Fokbis, Vol. 19, No.02 Desember 2020 STIE Putra Bangsa, ISSN 2623-2480
3	Riswanda Imawan dan Agus Wahyudin (2014) Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012	Variabel Dependen: Kemandirian keuangan daerah Variabel Independen: Belanja Modal	Variabel Independen: Ukuran, <i>Wealth</i> , <i>Leverage</i> Alat Analisis regresi linear berganda Tempat Penelitian provinsi Jawa Tengah	Variabel belanja modal berpengaruh dengan arah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Ukuran dan <i>Wealth</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap	<i>Accounting Analysis Journal</i> Volume 3 No. 2 (2014), Universitas Negeri Semarang ISSN 2252-6765

				kemandirian keuangan daerah.	
4	Inul Rofiq dan Fefri Indra Arza (2021) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai, dan <i>Leverage</i> terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kot a di Sumatera Barat	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen Belanja Pegawai	Penggunaan Variabel Independen Lainnya Alat Analisis regresi linear berganda Tempat penelitian Kabupaten/kot a di Sumatera Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD, dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Ekplorasi Akuntansi Vol. 3, No.3, Agustus 2021, Hal 705-719 Universitas Negeri Padang e-ISSN: 2656-3649 (Online)
5	Darwanis dan Ryanda Saputra (2014) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan	Variabel Independen: Belanja Modal	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan (indikator rasio pertumbuhan) Variabel Intervening: Pendapatan	Belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Terdapat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan. Hal ini terlihat dari koefisien yang	Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 1, No. 2, September 2014, Halaman 183-199 Universitas

	Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)		Asli Daerah Alat Analisis Jalur Path Tempat Penelitian kab/kota Provinsi Aceh	ditunjukkan PAD terhadap kinerja keuangan adalah positif. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah.	Syiah Kuala
6	Ema Nur Indah Firiyani dan Agus Endro Suworo (2021) Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: PAD, Belanja Modal, Belanja Pegawai	Variabel Independen: DAU Alat analisis regresi linear berganda Tempat Penelitian kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah	Pendapatan Asli Daerah signifikan dan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Umum berhubungan signifikan signifikan negatif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berhubungan negatif terhadap	Proseding Senapan Vol. 1, No. 1.1 Mei 2021, Hal 61-69 UPN Veteran Jawa Timur ISSN 2776-2092 (Online)

				tingkat kemandirian keuangan daerah.	
				Belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	

7	Sulaiman, M. Toyib, dan Melani (2021) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Belanja Modal	Variabel Independen: Retribusi Daerah, DAU, DAK, DBH Alat analisis regresi linear berganda Tempat penelitian Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan	Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat	Jurnal Akuntanika, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2021 hal 111-128 Politeknik Anika ISSN 2407-1072
---	---	--	---	--	--

					kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.	
8	Septa Efrieni Putri (2014)	Variabel Dependen: Kemampuan Keuangan Daerah (indikator menggunakan rasio kemandirian) Variabel Independen: Belanja Pegawai, Belanja Modal Alat analisis regresi data panel	Variabel Independen: Belanja barang dan jasa, Jumlah aset tetap daerah Tempat penelitian kabupaten/kot a Provinsi Sumatera Selatan	Variabel Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemampuan keuangan daerah, ini berarti bahwa variabel tersebut merupakan faktor faktor yang dapat meningkatkan rasio kemampuan keuangan daerah pada kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Variabel jumlah aset tetap daerah berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap	Akuntabilitas : Jurnal Penelitian dan Pengembang an Akuntansi Vol. 8 No. 1 Januari 2014 hal 63-96 Universitas Sriwijaya	

				kemampuan keuangan daerah.	
				Variabel belanja modal berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah pada kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan.	

9	Eny Wahyuni dan Lilis Ardini (2018)	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Kinerja Pendapatan Asli Daerah (rasio efektivitas)	Kinerja pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 7 no. 6, Juni 2018
	Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: Belanja Modal, dan Belanja Pegawai	Alat analisis regresi linear berganda	Belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	e-ISSN: 2460-0585
			Tempat penelitian kabupaten/kota provinsi Jawa Timur	Belanja pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian	STESIA Surabaya

					keuangan daerah.
10	Anita Lestari, Nasrullah Dali, dan Muntu Abdullah (2016) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Dana Alokasi Umum Alat Analisis regresi berganda Tempat Penelitian Provinsi Sulawesi Tenggara	DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. DAU berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya semakin besar DAU maka akan semakin rendah kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 2, 2016 Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara e-ISSN 2502-5171

				keuangan daerah, ini menunjukkan bahwa PAD memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.	
				Belanja modal berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya besar kecilnya perubahan pada belanja modal tidak memiliki peran dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.	

11	Diana Yusiawati dan A.A.I.N. Marhaeni (2020) <i>Effect Of Investment, GRDP Percapita, and Original Local Government Revenue on Regional Financial Independence through</i>	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli DAerah	Variabel Independen: Investasi, Variabel Intervening: Belanja Modal Alat analisis Jalur Path Tempat penelitian kabupaten/kot a Provinsi Bali	Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. PDRB Percapita dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan	<i>International Research Journal of Management , IT & Social Sciences</i> Vol. 7 No. 6, November 2020 Hal 96-108 ISSN 2395-7492 <i>Scientific</i>
----	--	---	--	--	---

<i>Capital Expenditures as Intervening Variables</i>	terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>and Literature Open Access Publishing</i>			
Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Investasi dan Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, artinya belanja modal dapat memediasi pengaruh investasi dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.				
	PDRB per kapita tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal, artinya belanja modal tidak dapat memediasi pengaruh PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan daerah.				
12	Dowes Ardinugroho, Albertus	Variabel Dependen: Kemandirian	Variabel Independen: Dana	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan	<i>Budapest International Research</i>

	Maqnu Soesilo, dan Mulyanto (2021) <i>The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Regional Expenditures on Regional Financial Independence (Case Study in Central Java Province 2014-2018)</i>	Keuangan Daerah Variabel Independen: Pendapatan asli daerah Alat analisis regresi data panel	Perimbangan, dan Belanja Daerah Lokasi Penelitian Provinsi Jawa Tengah	dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa semakin mampu daerah mengelola wilayahnya dengan baik dan cenderung kurang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan akan meningkat jika pendapatan asli daerah lebih besar dari dana perimbangan.	<i>and Critics Institute Journal (BIRCI Journal)</i> Vol. 4 No. 2, Mei 2021 Hal 3282-3293 e-ISSN: 2615-3076 (Online)
13	Muhammad Yasin (2020) <i>Analysis of Regional original Revenues and Routine Expenditures on Regional Financial Performance</i>	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Tempat penelitian Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Variabel Independen: Belanja Rutin Alat analisis jalur Path	Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh dengan arah negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten dan	Jurnal Mantik, Vol. 3 No. 4, February 2020 Hal. 64-69 <i>Institute of Computer Science (IOCS)</i>

	<i>in East Java Regencies and cities</i>			kota di Jawa Timur.	E-ISSN 2685-4236
				Belanja Rutin memiliki pengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur	
14	I Gusti Putu Putra Suambara dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2020) <i>The Influence of Regional Revenue, Balancing Funds, and Capital Expenditure on Regional Financial Performance</i> Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) Provinsi bali	Variabel Independen: PAD, Belanja Modal	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah (rasio pertumbuhan) Alat Analisis regresi linear berganda Tempat penelitian Sarbagita Provinsi Bali	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan	<i>American Journal of Humanities and Social Sciences Research</i> , Vo. 4, No. 6, hal. 220-225 e-ISSN 2378-703X

					daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.	
15	Jouzar Farouq Ishak (2021) <i>The Determinants Factors of Regional Financial Independence</i> Provinsi Maluku dan Papua	Variabel Dependen: kemandirian keuangan daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: Dana Perimbangan, lain-lain PAD yang sah Metode Analisis regresi berganda Tempat penelitian Provinsi Maluku dan Papua	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Maluku dan Papua. Sedangkan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Maluku dan Papua	<i>Proceedings of the 2nd Internatioanl Seminar of Science and Applied technology (ISSAT)</i> , Vol. 207, 2021 Atlantik Press	
16	Ina Sarah Normalita dan Amir Mahmud (2017) <i>Analysis of Capital Expenditure and Its Implications on Local Financial</i>	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Belanja Modal	Variabel Independen: Total Asset, Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah Metode Analisis Regresi Tempat	Dana Perimbangan dan aset tahun lalu berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap belanja modal. Dana Insentif Daerah (DID)	<i>Accounting Analysis Journal</i> Vol. 6 No. 2 2017 Universitas Negeri Semarang ISSN 2252-6765	

	<i>Independence</i>		Penelitian seluruh pemerintah daerah di Indonesia	tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	
17	Henda Hendawati, Dekrita Komarsakti dan Surya Ansori (2018) <i>The Effect of Capital Cos and General Allocation Fund to The Regional Financial Independence inv Bandung City Government</i>	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Belanja Modal	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum Metode analisis regresi berganda Tempat penelitian Kota Bandung	Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di pemerintahan Kota Bandung.	<i>The International Journal of Business Review (The Jobs Review)</i> Vol.1 No. 2 2018 Hal. 141-149 Universitas Pendidikan Indonesia
18	Baldric Siregar dan Nurna Pratiwi (2017) <i>The Effect of Local Government Characteristics and</i>	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Belanja	Variabel Independen: Ukuran, Usia, status, jumlah SKPD, <i>leverage.</i> Teknik Analisis Data	Variabel Ukuran, Usia, Status, Jumlah SKPD, dan <i>leverage</i> pemerintah daerah memiliki pengaruh positif	<i>Journal of Management and Entrepreneur ship</i> , Vol. 19 No 2 2017. Hal 65-71 Universitas

	<i>Financial Independence on Economic Growth and Human Development Index in Indonesia</i>	Pegawai	Partial Least Square (PLS)	Tempat penelitian seluruh kabupaten dan kota di Indonesia	dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Pegawai memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Index Pembangunan Manusia.	Kristen Petra ISSN 2338-8234 (online)
19	Harry Setiadi Utomo, Rusman Soleman, dan Hartaty Hadady (2021) <i>The Effect of Capital Expenditures and General</i>	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Belanja Modal	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum Alat Analisis: regresi berganda dan jalur path.	Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Belanja Modal		<i>Developing Country Studies</i> . Vol, 11 No. 4 Tahun 2021 hal 23-30 ISSN 2225-0565 (Online)

<i>Allocation Funds on Local Revenue as an Intervening Variable in Districts and Cities in North Maluku Province</i>	Tempat penelitian Provinsi Maluku Utara	secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dana Alokasi Umum secara tidak langsung berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal secara tidak langsung berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.		
20 Anggi Pratama Nasution, Bagus Handoko, dan Ilham Rizki Adi Pohan (2019) <i>Analysis of Influence of Regional Income, Central Government</i>	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: Transfer Pemerintah Pusat dan Efisiensi Belanja Daerah Teknik Analisis Regresi Linear Berganda Tempat	Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Efisiensi Belanja Daerah	<i>Accounting and Business Journal</i> , Vol. 1 No. 1, Maret 2019, Hal 1-16 Universitas Panca Budi ISSN 2746-4431

<i>Transfer, and Regional Shopping Efficiency on Regional Financial Independence</i>	penelitian kabupaten/kota Sumatera Utara	tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Secara Simultan, Variabel Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
--	--	--

Dara Wardani (2023) 183403036

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2021).

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan upaya dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menuju reformasi sektor publik dan kemandirian daerah di Indonesia. Penerapan otonomi daerah dengan maksud untuk menggali potensi sumber keuangan di daerah untuk meningkatkan pendapatannya serta mengalokasikan sumber daya tersebut

untuk belanja daerah demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam hal lain adalah untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah diukur oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah.

Mahmudi (2009: 18) menyatakan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula disreksi pemerintah daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah berdasarkan indikator yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin besar rasio Kemandirian Keuangan Daerahnya.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada di daerahnya salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif, salah satunya dalam alokasi belanja modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset yang memberikan nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola belanja modal dengan baik dan tepat sasaran agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal.

Daerah yang ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan menarik investor dalam menanamkan modal pada suatu daerah dan akan menambah pendapatan asli daerah sehingga kemandirian keuangan daerah akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Ardini (2018) yang menyatakan jika belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah akan naik karena belanja modal bertujuan untuk memberikan pemasukan atau pendapatan bagi daerah sehingga pendapatan asli daerah semakin bertambah dan

semakin maju. Indikator pengukuran Belanja Modal dapat diukur dengan menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja, yaitu dengan cara membandingkan realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2019: 163)

Kemudian sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pembangunan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga publik di daerah dalam rangka mengelola sumber daya daerah, tidak terlepas dari peran serta para pegawai pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik (Wahyuni, dan Ardini, 2018).

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan wujud peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian akan meningkat pula peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Peningkatan dalam pelayanan pemerintah akan menunjang peningkatan penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak dan retribusi yang merupakan komponen dari PAD (Putri, 2014).

Dalam situs *online* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi

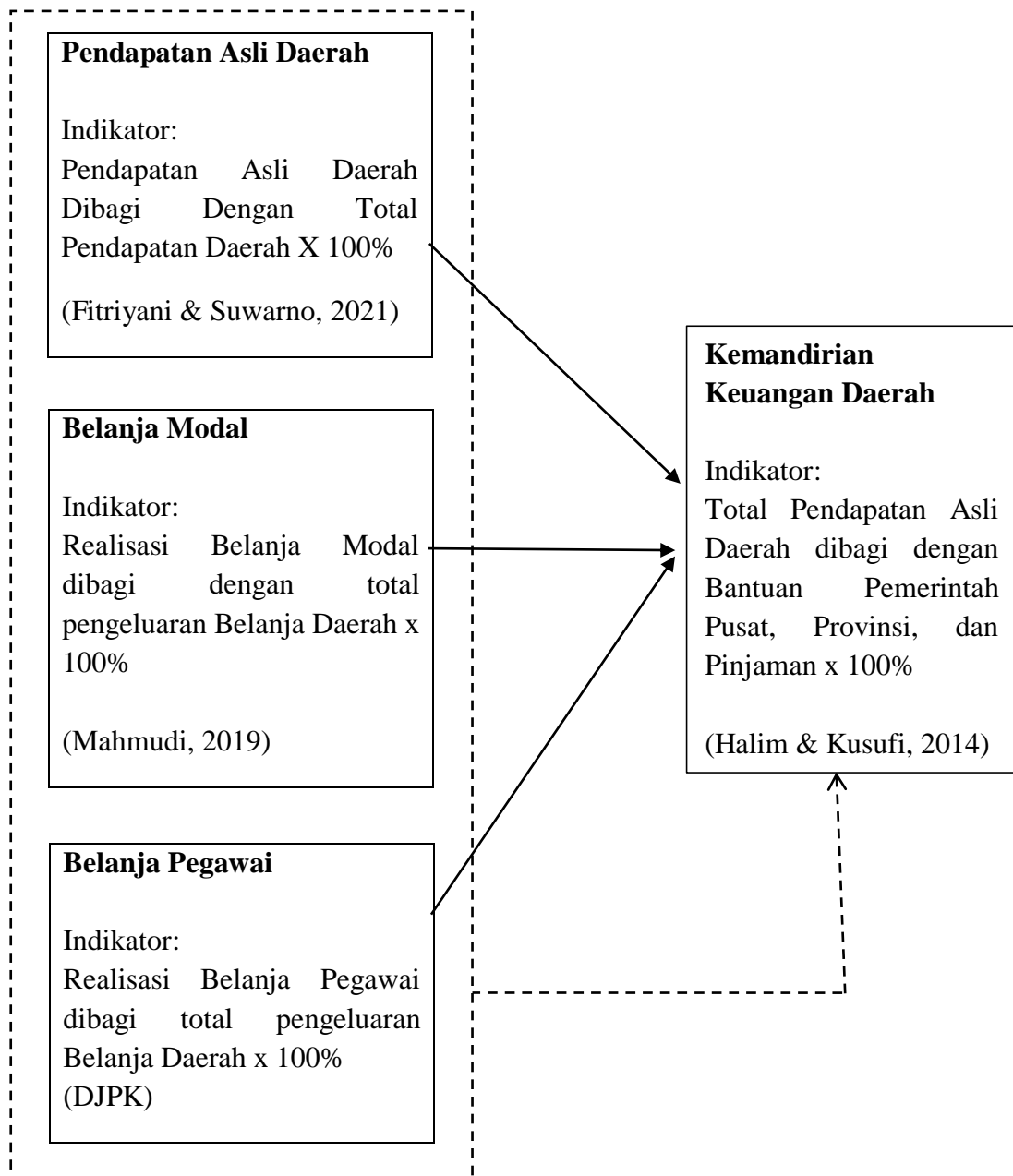
pemerintahan. Indikator pengukuran belanja pegawai menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio belanja pegawai terhadap total belanja, yaitu dengan membandingkan realisasi belanja pegawai dengan total belanja daerah.

Uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ema Nur Indah Fitriani dan Agus Endro Suwarno (2021), Anita Lestari dan Nasrullah Dali (2016), Diana Yusiawati dan Marhaeni (2020), I Gusti Putu Putra Saumabara dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2020) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian lain mengenai Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah juga dilakukan oleh Ina Sarah Normalita dan Amir Mahmud (2017), Henda Hendawati, Dekrita Komarasakti dan Surya Ansori (2018), serta Anita Lestari, dan Muntu Abdullah (2016) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Belanja Pegawai diduga berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septa Erfieni Putri (2014) yang menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap Kemampuan Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Baldric Siregar dan Nurna Pratiwi (2017) yang menunjukkan belanja pegawai berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kerangka pemikiran dari konsep di atas dapat dikonsepsikan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————→ = Parsial

- - - - -→ = Simultan

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019: 99) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah disusun dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena hipotesis hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah belum berdasarkan pada fakta empiris yang baru diperoleh dari pengumpulan data. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa peneliti, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan Daerah
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Belanja Pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.